



MOHAMMAD YATIM DAN IKHTIAR MEREALISASIKAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Bakhtiar

bakhtiar@uinib.ac.id

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak : Peristiwa PRRI telah berdampak terhadap pergerakan Islam di Minangkabau terutama bagi Muhammadiyah karena pada saat itu diidentikan oleh komunis dan sebagian pejabat dengan Masyumi. Muhammadiyah berada dalam kevakuman dan tekanan politik. Pimpinan dan aktifisnya nyaris meninggalkannya “ijok” ke luar. Mohammad Yatim dengan tidak berlatarbelakang pergerakan politik dan ulama berupaya menyelamatkan organisasi dan asetnya dari pendudukan dan pengambilalihan oleh pihak lain, pembelaan terhadap Muhammadiyah yang disuarakan oleh komunis untuk dilarang dan dibubarkan di Sumatera Barat dan mengkonsolidasikan Muhammadiyah pada tingkat cabang dan ranting yang berada di nagari-nagari dan kampung-kampung. Ia bergerak dari kampung ke kampung guna menghidupkan kembali Muhammadiyah dan amal usahanya yang sempat ditinggalkan oleh para pimpinannya. Dalam upaya dan perjuangannya itu ia, keluarga dan pendukungnya sering mendapat tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak, tetapi ia tidak bergeming sedikitpun untuk surut dan menghentikan langkahnya. Ini adalah upaya ia merealisasikan pemikiran politik dan keyakinannya dalam menggerakkan Islam melalui Muhammadiyah

Kata Kunci : Mohammad Yatim, politik Islam dan Muhammadiyah

A. PENDAHULUAN

Meletusnya perang bersenjata yang tidak berimbang antara pemerintah pusat dengan PRRI mengakibatkan kehidupan masyarakat Sumatera Barat berada dalam keadaan lumpuh dan sulit. Sejak peristiwa itu terjadi fase kemunduran dalam semua tatanan kehidupan masyarakat. Sebagian besar tokoh adat, intelektual dan ulama eksodus keluar (Jawa dan negara jiran seperti Malaysia) karena tekanan dan intimidasi yang sangat kuat. Pada saat itu muncul istilah “*takuik di ujuang badia, pai kapangka badia*”.

Pada tingkat nagari dan kampung-kampung muncul tindakan kesewenang-wenangan dari pihak OPR (Organisasi Pertahanan Rakyat) bentukan pemerintah. Suasana demikian masih sangat kuat terjadi

setelah adanya amnesti dan abolisi terhadap tokoh dan aktifis PRRI baik tekanan sosial, budaya maupun politik. Kerusakan akibat tekanan itu tidak saja berdampak pada psikologis, sosial, budaya tapi juga infrastruktur (Abrar Yusra: 1997: 127). Tekanan itu masih sangat kuat setelah adanya amnesti dan abolisi terhadap aktifis PRRI (Abrar Yusra: 1997: 110). Akibatnya, nagari-nagari menjadi lengang dan sepi karena hampir semua tenaga produktif eksodus. Dibalik banyaknya eksodus itu, terjadi suatu fenomena budaya menyelamatkan diri. Pada perkembangannya, yang merantau bukan hanya lagi laki-laki, tetapi diikuti oleh pihak perempuan baik dengan dibawa suaminya atau ikut saudaranya. Jumlahnya semakin bertambah dan meningkat.

Begitu pula kepemimpinan masyarakat di nagari banyak yang beralih tangan kepada simpatisan dan kader PKI meskipun tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin. Kemudian dalam mengendalikan keamanan dikampung-kampung, pemerintah membentuk organisasi lokal “Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR)” dengan tugasnya memelihara keamanan, fungsi pembangunan dan mengamati serta menahan orang yang dicurigai sebagai pendukung PRRI (Abrar Yusra: 1997: 110). Pada konteks ini muncul istilah “tukang tunjuk” karena merasa memiliki kekuasaan yang dapat digunakan setiap saat untuk menunjuk sampai memasukan orang ke dalam penjara bahkan menghilangkan nyawa sekalipun. Masa ini merupakan masa yang sulit dan merasa menjadi bagian orang kelas dua di kampung sendiri. Akibatnya, nagari-nagari menjadi lengang dan bahkan banyak yang lari itu tidak mengaku sebagai orang Minang dan mengganti namanya dengan nama lain guna menyembunyikan identitasnya (Abrar Yusra: 1997: 111). Apalagi dengan adanya operasi pembersihan aktivis dan simpatisan PRRI di berbagai daerah muncul kegaman dan ketakutan. Secara psikologis masyarakat di daerah ini bak “anak ayam kehilangan induk”. (Mhd Ilham: 2016: 8)

Peristiwa ini secara langsung juga berdampak terhadap pergerakan Islam di Minangkabau terutama bagi Muhammadiyah yang oleh para peneliti disematkan sebagai pergerakan Islam modernis. Sebab, Muhammadiyah selama ini diidentikan dengan Masyumi meskipun jauh sebelumnya sudah menyatakan keluar

dari keanggotaan istimewa dari partai tersebut. Sebagian besar yang ikut eksodus baik ke provinsi tetangga maupun ke negeri Jiran, seperti Malaysia adalah pimpinan, tokoh dan aktifis Muhammadiyah (Mhd Ilham: 2016: 8). Begitu pula tidak ikut secara psikologis tertekan oleh keadaan yang menyulitkan itu sehingga Muhammadiyah mengalami kelumpuhan. Pimpinan organisasi dan pimpinan amal usahanya seperti pendidikan ditinggalkan sehingga sebagiannya juga diambil alih oleh pihak komunis. Keadaan demikian itu bukan hanya dialami pada tingkat cabang dan ranting tetapi juga terjadi pada tingkat wilayah. Dalam situasi yang lumpuh itulah muncul Mohammad Yatim menyelamatkan dan mengkonsolidasikan kembali organisasi pergerakan Islam ini. Ia mengorbankan dan mempertaruhkan keluarga, jiwa dan hartanya dalam upaya merealisasikan keyakinannya terhadap pergerakan Islam yang sudah lama ia perjuangkan sebagai perwujudan dari pemikiran politik Islam yang ia anut. Ia dalam perjuangannya berbeda dengan tokoh Islam lainnya yang lebih memilih tidak berada pada jalur politik formal melainkan politik dalam artian yang lebih substantif, yaitu membangun gerakan Islam secara kultural. Dengan pemahaman dan keyakinan demikian ia berjuang habis-habisan pula untuk kembali menghidupkan dan mengkonsolidasikan pergerakan Islam “Muhammadiyah” yang sudah ditinggalkan oleh pimpinannya. Pada masa itu Ia harus “mengambil alih” Pimpinan Wilayah selama dua periode 1958-1961 dan 1961-1964 (Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat: 1976 dan Moehammad Yatim:

Dokumen Pribadi). Dalam situasi demikian ia oleh Pimpinan Pusat dan Wilayah Muhammadiyah dipandang seorang pimpinan yang ulet, tabah dan meyakinkan dalam meneruskan cita-cita dan usaha persyarikatan (Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat: 1976 dan Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi).

B. KEHIDUPAN KELUARGA DAN KARIRNYA

Ia dilahirkan pada tanggal 22 April 1901 di Korong Panjang Jorong Parit Ranting, Koto Nan IV Payakumbuh dan meninggal dalam usia 75 tahun pada tanggal 10 Februari 1976 di Jorong Tanah Mati Kota Nan IV Payakumbuh (Harian Haluan: 14 Februari 1976). Sedangkan istrinya, Mahdaniar adalah aktifis 'Aisiyiah meninggal dalam usia 60 tahun di RSUP Padang pada tanggal 12 Desember 1975 (Harian Haluan: 14 Februari 1976). Kelahirannya, membawa suasana yang tenang dan gembira bagi keluarganya sekaligus harap-harap cemas. Sebab, ibunya pernah mengalami traumatis dan putus asa yang disebabkan setiap melahirkan selalu meninggal (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Setelah usianya beranjak remaja ia memiliki tekad hidup tidak ketergantungan pada kedua orang tua meskipun pada keluarganya ia adalah satu-satunya anak yang menjadi harapan orang tua dan kaumnya. Cita-citanya itu ia upayakan dengan memasuki dunia kerja dengan diterimanya bekerja sebagai pegawai pada Kantor Pos dan Telegraf. Beberapa tahun setelah bekerja ia berhasil mengumpulkan sejumlah dana untuk menghajikan orang tuanya sehingga betul-betul dapat direalisasikan pada tahun 1923

(Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Namun sejak orang tuanya berangkat komunikasi nyaris putus, tidak ada lagi kabar tentang keadaannya. Hal ini menyebabkan hatinya tidak tenang dan merasa gundah dan kuatir. Keadaan itu semakin menyedihkan adanya dan berduka ketika informasi melalui surat kawat yang ia terima langsung menyatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia di Mekah. Namun demikian, ia tidak larut dengan kesedihan dan dukanya itu dengan berupaya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah swt.

Kemudian ia mengakhiri masa bujangannya dengan menikahi Mahdaniar, gadis yang juga berasal dari kampungnya sendiri. Mahdaniar adalah sosok perempuan yang setia mendampingi hidupnya baik dikala suka maupun duka sejak masa penajajaan hingga akhirnya kehidupannya. Selain setia mendampinginya, Mahdaniar juga aktif menggerakan Aisiyiah dimanapun suaminya bertugas. Dari pernikahan itu ia dikarunia 10 orang putra putri, diantaranya; Zulkarnain (lahir di Binjai, 18 Februari 1938 dan meninggal di Payakumbuh, 23 Oktober 1995), Mahdalena (lahir di Payakumbuh, 8 April 1939), H. Nurikhwan (lahir di Payakumbuh, 10 Oktober 1940 dan meninggal di Payakumbuh, 10 September 2009), Yetminiar (lahir di Payakumbuh, 6 Februari 1942), Darmiyati (lahir di Payakumbuh, 30 Agustus 1943), Muhammad Adnil (lahir di Payakumbuh, 14 Maret 1945), Muhammad Rizal (Lahir di Kisaran, 2 Februari 1950), Nurmiyati (Lahir di Kisaran, 18 Juni 1952), Muhammad Yusuf (lahir di Padang, 22 Juli 1954)

dan Rahmiyati (lahir di Padang, 26 November 1956) (Muhammad Yusuf: Dokumen Pribadi).

Sedangkan karirnya sebagai pegawai pada Kantor Pos dan Telegraf dimulai masa usia 16 tahun, yaitu sejak tanggal 1 April 1917 sebagai *Inlandseh Post Asistent* di Medan sampai pada masa usia pensiun tanggal 1 April 1961. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah inspektur Pos dan Telegraf di Padang. Dengan demikian ia telah mendedikasikan dirinya pada Kantor Pos dan Telegraf selama 44 tahun pada tiga zaman, yaitu, zaman penjajahan Belanda (periode 1917-1943), zaman Jepang (periode 1943-1945) dan zaman kemerdekaan (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Selama bekerja pada kantor pos itu, ia beberapa kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai dedikasinya sebagai seorang profesional, yaitu pada tahun 1956 dengan simbol air perak, tahun 1957 setelah berdinis selama 40 tahun dan 1960 terkait dengan upayanya menyelamatkan/mengungsikan uang Djawatan dan barang-barang berharga lainnya dalam jumlah yang besar dan menjemputnya kembali di Padang Panjang dan Sawahlunto (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Penghargaan terakhir ia terima karena tetap membuka Kantor Pos dan Telegraf pada saat sedang bergejolak dengan meletusnya peristiwa PRRI (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi).

Dalam masa yang produktif itu, ia bekerja tidak berada pada satu daerah saja melainkan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya mulai dari kampungnya sampai ke Sigli Aceh, Tapanuli, Rengat dan berakhir di Padang. Ia sejak mudanya

tidak banyak terlibat dengan pergerakan politik daerah. Hal itu sejalan dengan pekerjaan yang ia geluti sehari-hari sebagai pegawai sebuah perusahaan yang dikelola oleh pemerintah sejak masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan meskipun kadangkala tidak dapat pula menghindar dari situasi demikian. Dalam hal ini beberapa jabatan di pemeritahan yang memiliki keterkaitan dengan politik pernah dipegangnya terutama selama bertugas di Payakumbuh dan Jambi. Namun ia tidak hanyut dengan jabatan tersebut. Ketika tugas pokoknya sebagai pegawai Kantor Pos dan Telegraf menuntut meninggalkannya, maka jabatan itu ia serahkan kembali kepada pihak yang memberikan tugas itu. Selain tidak memiliki tendensius terhadap jabatan-jabatan politik ia dalam kesehariannya juga tidak banyak terlibat dalam kegiatan yang umumnya digeluti oleh para mubaligh. Namun bukan berarti ia meninggalkan pembinaan dan berdakwah, tetapi ia lakukan dengan pendekatan dan cara yang berbeda daripada tokoh lainnya. Komitmennya terhadap pengembangan Islam dan dakwah terlihat dari perjalanan karirnya sebagai pegawai Kantor Pos dan Telegraf. Kemana pun saja ia ditugaskan oleh pimpinannya ia selalu memberikan perhatian dan waktu kepada dakwah dan pergerakan Islam (Nurmiyati: Wawancara: 2015). Pilihannya sejak dari awal lebih cenderung kepada pergerakan Islam yang tidak bernuansa politik praktis tetapi lebih memilih pada pergerakan yang bersifat kultural. Oleh karena itu pilihannya adalah pergerakan Islam yang oleh para peneliti keislaman disematkan sebagai Islam modernis, yaitu Muhammadiyah.

Namun berbeda pula dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya, seperti Buya AR. Sutan Mansoer, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto, Buya Malik Ahmad, Hamka, Dt. Gunung Hijau, H. Amir Ali, Buya Harun el-Maani, Buya ZAS, Buya Radhin Rahman, Idris Manaf dan seterusnya. Kesemua tokoh yang disebutkan itu umumnya melibatkan dirinya secara aktif pada pergerakan politik dan kegiatan kemubalighan. Oleh karena itu tokoh-tokoh tersebut sangat dikenal dan populer dikalangan masyarakat luas terutama dilingkungan Muhammadiyah. Demikian pula sebagiannya ada yang pernah menduduki jabatan kepala daerah dan anggota legislatif serta jabatan pada instansi pemerintah.

Dalam masa meniti karir pada Kantor Pos dan Telegraf ia bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku pada badan usaha milik negara tersebut. Namun bukan berarti tidak pernah mengalami masalah dengan atasan tempat ia bekerja. Ia pernah mengalami perlakuan atas kesewenang-wenangan dan kezaliman atasannya (Nurmiyati: Wawancara: 2015) sehingga terancam dipindahkan bahkan diberhentikan. Perlakuan yang demikian tidak ia biarkan begitu saja meskipun atasannya itu adalah pihak Belanda yang sedang berkuasa penuh terhadap rakyat pribumi. Hal itu tidak ia terima begitu saja dan melawan kezaliman tersebut apapun risikonya yang terjadi karena menurutnya kezaliman itu tidak hanya terkait dengan harga dirinya secara pribadi melainkan sudah menginjak-injak martabat dari bangsanya. Pada akhir kependudukan Belanda di Indonesia dan jelang beralihnya kepada kekuasaan Jepang ia yang dipilih oleh

pihak pemerintah kolonial mengepalai Kantor Pos dan Telegraf (*chef post on telegrap*) Payakumbuh. Pada saat itu ialah satu-satunya orang Indonesia yang dipercaya memimpin kantor pos ini sedangkan yang lainnya seperti Bukittinggi dan Padang dikendalikan oleh Belanda sendiri (Nurmiyati: Wawancara: 2015). Ketika itu ia berpangkat *Bodryfs Ambtenaar 10* (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi).

Pada saat Jepang mengambil kekuasaan dari Belanda, Kantor Pos Bukittinggi dan Padang ditutup (segel), tidak demikian halnya dengan Kantor Pos Payakumbuh. Kantor pos yang ia pimpin ini tetap dibuka dengan pertimbangan dikepalai oleh orang Indonesia (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamkan oleh Soekarno-Hatta ia mengambil peran strategis bagi penyebaran informasi kepada masyarakat terutama di Payakumbuh dengan memberikan surat kawat yang diterimanya dari Kantor Pos Padang kepada tokoh pemuda, seperti Mainoeddin dan Amir Wahid (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Jepang di saat itu nyaris membeslak dan menyimpan semua pesawat radio sehingga informasi kemerdekaan tidak bisa diakses oleh masyarakat luas. Begitu pula pada masa awal kemerdekaan selain bertugas sebagai Kepala Kantor Pos dan Telegraf Payakumbuh ia oleh Komite Nasional Kabupaten 50 Kota yang dipimpin Darwis Datuk Tumanggung dan dokter Adnan ditugasi sebagai asisten Soetan Alamsyah. Sedangkan pada waktu dokter Adnan menjadi Bupati Lima Puluh Kota, ia dan Sjoetjpto Opzioeter

serta Nazaruddin Thaha sempat pula ditugasi sebagai kepala urusan Pasar Payakumbuh (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Jabatan yang bernuansa politis tersebut tidak lama ia pegang karena harus melaksanakan tugas pokoknya sebagai pegawai Pos dan Telegraf. Oleh atasannya dipindahkan ke Jambi guna membenahi Kantor Pos dan Telegraf yang keadaannya sudah sangat tidak terurus dan tidak dipercayai lagi oleh masyarakat. Ia pindah ke Jambi tahun 1946 (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi).

Ketika bertugas di Jambi setelah melakukan pembenahan keadaannya dapat dipulihkan sehingga kepercayaan masyarakat kembali sebagai pos wessel. Selain itu ia sempat pula dipilih menjadi ketua Persatuan Pegawai Kota Jambi dan di lantik oleh Tuan Resident (Raden Ibno Kartapati, putra ex Sultan Jambi). Lembaga ini dijadikan bagian keuangan dari keresidenan Jambi, yang berfungsi sebagai penerima setoran uang pinjaman nasional dari seluruh bupati-bupati, wedana-wedana dan asisten-asisten wedana (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Pada tahun 1947 dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada gubernur di Palembang dalam membantu pembiayaan pertahanan kemerdekaan, karena Palembang kembali diserang oleh Belanda baik dari laut maupun udara. Selanjutnya, Moehammad Yatim diangkat menjadi Kapten Titulair dalam fungsinya mengamankan gempuran Belanda ketika agresi yang kedua. Begitu pula ketika peredaran uang kertas dan uang pecahan terbatas serta mengalami kelangkaan yang semakin menyulitkan ekonomi masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ia menggagas mengeluarkan kupon-kupon dengan harga Rp.1,-; Rp. 2,50; Rp. 10,- sebagai alat tukar yang sah bagi masyarakat (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi).

Ketika berdirinya Organisasi Serikat Sekerdja Pos Telegraf dan Telepon (SSPTT) pada tanggal 8 Oktober 1958 di Bandung, ia ditunjuk sebagai ketua Pimpinan Daerah V (Sumatera Barat dan Riau) meskipun organisasi yang bergerak pada profesi yang sama sudah ada pula berdiri, yaitu SB Postel yang berafiliasi dengan SOBST (PKI) (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Organisasi ini tumbuh dan berkembang dengan baik dan anggotanya semakin hari semakin banyak. Begitu pula pergerakannya semakin dinamis. Dalam masa kepemimpinannya ia menolak melakukan mogok sebagaimana yang dilakukan SSPTT di Sumatera Utara atas protesnya terhadap Djawatan. Jabatan yang sama tetap dipercayakan kepadanya dalam pemilihan tahun 1961 secara aklamasi. Namun jabatan pada periode kedua ini hanya diemban sampai tahun 1962 (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi) dan diserahkan kepada generasi yang lebih muda.

Setelah memasuki usia pensiun, ia selain masih aktif di SSPT juga menginisiasi pembentukan Persatuan Pensiunan Republik Indonesia (PPRI) di Sumatera Barat meskipun sebelumnya sudah berdiri PPSI berpusat di Solo, tetapi kurang berkembang dan kurang inisiatif” (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi) Pembentukannya itu dilatarbelakangi oleh keprihatinannya terhadap para pensiunan yang tidak memiliki wadah perjuangan dalam

menyampaikan hak-haknya dan memberikan masukan perbaikan kehidupan bangsa dan negara yang lagi sedang menghadapi banyak masalah. Perkumpulan pensiunan ini berawal dari pertemuannya dengan Soetardjo Hadikoesoemo, ketua PPRI pada tanggal 1 Oktober 1960 di Jakarta. Organisasi yang baru didirikan ini berkembang lebih cepat dan mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi) karena PPRI bergerak secara aktif dalam memperjuangkan hak-hak dan mengupayakan kesejahteraan bagi anggotanya (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi).

C. MENUMBUHKAN URAT TUNGGAH PERGERAKAN

Ketokohan Moehammad Yatim dalam Muhammadiyah sebelum meletusnya peristiwa PRRI nyaris tidak muncul baik ketika kepemimpinan Buya Malik Ahmad, Buya HAMKA dan seterusnya. Namun ia bukanlah orang baru dalam aktifitas Muhammadiyah. Ia adalah salah seorang tokoh yang tidak pernah berhenti memikirkan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan dan memperkuat Muhammadiyah. Ia sebagai pegawai pada Kantor Pos dan Telegraf bersama istrinya, Mahdaniar selalu mengambil peran memelopori, menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah di mana pun ia bertugas. Sebut misalnya, ketika ia bertugas di Sigli, Aceh ia menjadi anggota pimpinan Muhammadiyah Sigli, Aceh periode 1934-1936 (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Pada periode ini ia mampu meyakinkan banyak orang terhadap kehadiran Muhammadiyah

sebagai organisasi Islam yang mengadvokasi masyarakat dari ketertindasan dan keterbelakangan terutama bagi pegawai Kantor Pos dan Telegraf di tempat ia bekerja. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah ketika itu juga sangat kompleks. Selain berhadapan dengan tradisi masyarakat yang masih terikat dengan kultur yang bercampur aduk antara ajaran Islam dengan tradisi lokal, Muhammadiyah juga menghadapi situasi berhadapan dengan penjajahan Belanda. Dalam situasi demikian, Moehammad Yatim dengan keuletannya mampu menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah di daerah Sigli ini.

Ketika ditugasi Kantor Pos dan Telegraf di Sumatera Utara pada tahun 1937, ia memelopori pendirian dan pembentukan Ranting Muhammadiyah di Binjai. Oleh karena di daerah ini ia menjadi perintis pembentukan ranting, dan orang yang diajak bergabung dalam Muhammadiyah belum banyak yang mengetahui dan memahami hakikat perjuangan dan organisasi Muhammadiyah, atas saran dan permintaan orang yang diajak ia diminta langsung memimpin ranting. Di ranting ini Moehammad Yatim memimpin Muhammadiyah pada periode 1937-1938 (Moehammad Yatim: Dokumen Pribadi). Dalam rentang satu tahun tersebut, ia dengan dibantu oleh tokoh-tokoh setempat mampu menggerakkan Muhammadiyah meskipun menghadapi masyarakat yang masih terjebak dalam pencampuran ajaran Islam dengan kultur lokal. Selain itu ia juga menghadapi tantangan dari petugas keagamaan kerajaan Langkat yang merasa terusik terhadap tradisi yang dipelihara selama ini.

Ketika ditugaskan kembali ke Medan tahun 1938, ia bergabung dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan dan menjadi anggota pimpinan. Di sini ia menjadi salah seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah meskipun bergabung hanya selama satu tahun. Pada tahun 1939 ia dipindahtugaskan kembali ke kampung halamannya, Payakumbuh. Di Payakumbuh, Muhammadiyah sudah tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun tantangan yang dihadapinya juga tidak ringan. Berbagai tuduhan dialamatkan kepada pimpinan maupun kelembagaan yang berujung pada pelarangan pengajian dan penutupan panti asuhan oleh kepala nagari dan lembaga nagari (Aqib Suminto: 1985: 195). Namun pergerakan Muhammadiyah tetap berjalan dan bahkan semakin menguat meskipun menghadapi tradisi lokal yang mencampuradukan ajaran agama dengan kebiasaan serta politik.

Pada masa ia pindah ke Payakumbuh, ia dapati kebanyakan dari Pimpinan Muhammadiyah berasal dari alumni Sumatera Thawalib Padang Panjang. Para alumninya sering dapat tekanan politik dari pemerintah karena dicurigai aktifis PERMI (Deliar Noer: 1996: 60). Tekanan yang sama juga diperlakukan kepada Muhammadiyah. Para Pimpinan Muhammadiyah sering dipanggil, dinasihati dan bahkan sering ancaman datang dari tuan *Assistent Schumacher, Hoofd Van Plaatsly Bestuur J do Graaf*, Demang Thaib, Assistent Demang Zakir dan Inyik Dagang Datuk Tuah (Moehammad Yatim: 1963). Bahkan Pimpinan dan aktifis Muhammadiyah diminta supaya

meninggalkan dan tidak mengembangkan lagi Muhammadiyah.

Dalam situasi demikian, Moehammad Yatim hadir menetralkan dan menghidupkan kembali Muhammadiyah tanpa ada tekanan yang sangat berarti. Hal itu disebabkan oleh dua hal, yaitu; *Pertama*, Moehammad Yatim secara personal tidak terlibat di dalam partai PERMI yang dipersepsikan berbeda haluan dengan pihak yang sedang berkuasa ketika itu. Ia adalah pegawai Kantor Pos dan Telegraf yang jauh dari pro kontra. Jadi, ia tidak memiliki resistensi politik sehingga gerakan yang dibangunnya tidak begitu kontra-produktif dengan penguasa. Ia lebih banyak menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah dalam konteks kultural dan tidak lewat jalur politik. *Kedua*, Moehammad Yatim memiliki strategi yang berbeda dengan pimpinan sebelumnya. Kalau pimpinan sebelumnya, tidak jarang melakukan kritik tajam secara terbuka terhadap kebijakan dan perilaku pihak yang berkuasa, terlebih jika dinilai menyimpang dari ajaran agama. Cara demikian tidak dilakukan oleh Moehammad Yatim. Ia melakukannya dengan pendekatan yang lebih persuasif, santun, halus dan tidak reaktif sehingga pihak yang berbeda dengan Muhammadiyah tidak mudah tersinggung dan tidak menganggap lawan. Hal itu bukan berarti Moehammad Yatim kehilangan konsistensinya sebagaimana perjuangan yang digariskan Muhammadiyah. Cara itu dilakukannya untuk strategi agar Muhammadiyah dapat diterima oleh semua pihak termasuk yang selama ini antipati terhadap Muhammadiyah. Pendekatan ini cukup berhasil

membawa Muhammadiyah masuk ke dalam jantung masyarakat luas di Payakumbuh sehingga Muhammadiyah dapat lebih berkembang dan leluasa dalam menggerakkan dakwahnya. Moehammad Yatim dalam hal ini selain bekerja aktif sebagai pegawai Kantor Pos dan Telegraf Payakumbuh, juga memimpin Muhammadiyah Payakumbuh selama dua tahun, tepatnya periode 1939-1941 (Moehammad Yatim: 1963).

Pada tahun 1946, Moehammad Yatim kembali dipindahtugaskan ke Jambi dalam situasi yang amat terbatas dan kondisi Kantor Pos dan Telegraf yang tidak terurus. Tambah lagi pegawainya yang tidak lagi bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya. Semua hal itu, mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Pos dan Telegraf tidak ada lagi. Keadaan ini dipulihkannya dengan pendekatan profesionalitas, persuasif dan kekeluargaan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kepercayaan masyarakat dapat kembali dipulihkan. Begitu pula halnya dengan Cabang Muhammadiyah Jambi. Kondisinya juga dalam keadaan sulit dan dilema. Sama dengan ditempat yang lain, ketika ia ditugaskan oleh Kantor Pos dan Telegraf sebagai kerja pokoknya, ia selalu melihat secara dekat bagaimana keadaan Muhammadiyah di sekitar ia bekerja. Jika Muhammadiyah belum ada, ia berinisiatif mengenalkan dan membentuk dengan merangkul dan mengajak orang-orang untuk menggerakannya.

Di Jambi, Muhammadiyah ia perhatikan sudah tumbuh dan berkembang. Akan tetapi secara internal mengalami masalah terutama

dalam hal kepemimpinan. Sebagian besar personalia Pimpinan Cabang Muhammadiyah secara ideologi tidak sejalan dengan Muhammadiyah itu sendiri. Anggotanya lebih banyak berasal dari anggota komunis. Akibatnya, terjadi polemik dikalangan warga persyarikatan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, Muhammadiyah mengalami kemandekan, mati suri dan tidak bergerak. Ia selain membenahi dan memulihkan keadaan Kantor Pos dan Telegraf, juga membangun kembali Cabang Muhammadiyah yang dalam keadaan lumpuh tersebut. Ia merangkul kembali tokoh-tokoh yang pernah aktif di Muhammadiyah termasuk yang pernah aktif di komunis. Keaktifan yang terakhir dalam pandangannya bukan karena faktor ideologis melainkan disebabkan persoalan ekonomi yang teramat sulit. Formasi di pimpinan cabang ternyata memang hampir sama dengan yang sebelumnya kebanyakan berasal dari anggota komunis. Akan tetapi, ia berkeyakinan mereka akan dapat kembali kejalan yang benar bersama-sama membesarkan Muhammadiyah. Apa yang diyakininya ternyata memang benar, bahwa anggota komunis yang bergabung di Muhammadiyah bukan didorong oleh ideologis, tetapi dominan faktor ekonomi. Al-hasil, Muhammadiyah dapat kembali dibangun, konsolidasi organisasi dapat dilakukan secara utuh dan anggota yang cabang Muhammadiyah yang pernah aktif di komunis menyatakan keluar dari keanggotaannya, meskipun Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang dipimpinnya pernah pula dapat teguran dari Buya AR. Sutan Mansur sebagai Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah. Pada konteks ini,

Moehammad Yatim berhasil meyakinkan Buya AR. Sutan Mansur sehingga Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jambi dapat digerakan dan dipulihkan kembali (Moehammad Yatim: 1963).

Dalam hal itu, Moehammad Yatim mengungkapkan bahwa:

“Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jambi yang kami pimpin menerima teguran dari Pimpinan Sumatera Tengah Buya AR. Sutan Mansoer dan setelah dijalankan bahwa anggota-anggota yang 80% jadi PKI itu, bukan berideologi PKI melainkan karena perut, Buya AR. Sutan Mansoer memaklumi dan menyetujui tindakan kami. (Moehammad Yatim: 1963)”

Kutipan pernyataan Moehammad Yatim di atas menunjukkan bahwa gerakan Muhammadiyah yang dibangun sejak masa lalu bersifat merangkul dan membina, bukan menghakimi. Kondisi dan situasi yang menyulitkan kadang membuat umat terjebak kepada sikap yang pragmatis sehingga merugikan perjuangan dakwah itu sendiri. Ia memimpin Cabang Muhammadiyah Jambi hanya selama dua tahun, tepatnya periode 1946-1948 (Moehammad Yatim: 1963), disebabkan pindah tugas ke Kisaran. Di sini ia dapati organisasi Muhammadiyah belum hidup, tetapi orang-perorangan sudah banyak yang memiliki pemikiran yang sama dengan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, ia berinisiatif mendirikan ranting dengan mengajak tokoh-tokoh lain terutama masyarakat setempat. Denyut pergerakan yang ia inisiasi tersebut mendapat respon positif dari

masyarakat. Apalagi Cabang Muhammadiyah Kisaran sudah ada pada saat itu. Oleh karena di ranting tersebut sudah ada beberapa tokoh yang sangat memungkinkan untuk memimpin ranting tersebut, ia menyerahkan pucuk pimpinannya kepada yang lain. Ia hanya memposisikan diri sebagai wakil ketua. Ranting ini bergerak lebih dinamis dan perkembangannya sangat menggembirakan sehingga dipercaya sebagai tuan rumah konferensi daerah sebanyak dua kali pelaksanaan.

Pada tahun 1953 ia kembali dipindahtugaskan oleh Pimpinan Kantor Pos dan Telegraf ke Padang. Di Padang ia menggabungkan diri dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kampung Jawa. Pada saat itu, ia diberikan kepercayaan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah Kampung Jawa sebagai salah seorang wakil ketua. Pada periode ini berbagai kegiatan Muhammadiyah dapat dilaksanakan baik dalam bentuk mendirikan sekolah maupun wirid dan pengajian. Sama halnya dengan di tempat-tempat yang lain, yang dialaminya bahwa pergerakan Muhammadiyah tidak selalu mulus. Akan tetapi menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan dimaksud bukan hanya datang dari masyarakat yang tetap bersikukuh dengan “tradisi lokal” berupa pencampuran antara ajaran agama dengan kebiasaan, tetapi juga muncul dari pihak penguasa lokal. Tekanan-tekanan dari berbagai pihak ini biasanya dihadapi oleh pimpinan dan warga Muhammadiyah dengan sabar dan arif, yang akhirnya berdampak kepada perkembangan Muhammadiyah. Pada ranting ini Muhammadiyah menghadapi hal yang

sama. Pendirian sekolah dan pengajian sering menghadapi ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak dengan berbagai tuduhan. Untungnya, Moehammad Yatim tidak berlatarbelakang tokoh yang pernah aktif di partai politik maupun perguruan yang memiliki hubungan dengan pergerakan tertentu sehingga ia memiliki hubungan baik dengan semua komponen masyarakat.

D. MENGKONSOLIDASIKAN GERAKAN DI TENGAH GEJOLAK POLITIK

Meletusnya peristiwa “bagolak”, yang dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat dengan istilah peri-peri (PRRI), Moehammad Yatim dengan berani tidak terpengaruh dengan situasi yang ada pada waktu itu. Kantor Pos tempat ia bekerja sehari-hari tetap buka sebagaimana hari-hari biasanya. Berbeda dengan kantor pos di Payakumbuh dan Bukittinggi semuanya ditutup selama peristiwa pergolakan (Moehammad Yatim: 1963). Tokoh dan masyarakat Sumatera Barat sebagian besarnya meninggalkan daerahnya pergi ke provinsi dan negara jiran. Tokoh yang ikut “*ijok*” tersebut sebagian besarnya juga pimpinan, aktifis dan warga Muhammadiyah.

Pada masa ini nyaris aktifitas Muhammadiyah terhenti dan mengalami kelumpuhan. Walaupun ada yang tidak ikut *ijok*, tidak berani menyebut dirinya sebagai orang Muhammadiyah. Lumpuhnya aktifitas Muhammadiyah sekaligus pada masyarakat tidak ada lagi kegiatan organisasi yang berbasis pada sosial dan keagamaan termasuk organisasi yang mengusung isu-isu kewanitaan (Moehammad Yatim: 1963) terutama

pada daerah-daerah dominannya Muhammadiyah. Operasi pembersihan yang dilakukan terhadap PRRI di hampir seluruh Sumatera Barat telah meninggalkan trauma psikologis mendalam terutama bagi perempuan sehingga masyarakat kehilangan pegangan (Moehammad Yatim: 1963) termasuk Muhammadiyah. Peristiwa ini memberikan dampak yang sangat mendasar dalam gerakan Muhammadiyah. Aktifis dan warga Muhammadiyah bagaikan “kue bika”. (Ilyas Maksum: Wawancara: 2016) Sebab, ketika gejolak politik ini meletus, yang menjadi sasaran utamanya adalah warga Muhammadiyah.

Komunis yang memusuhi Muhammadiyah sejak lama merasa mendapat kesempatan untuk menghabisinya. Fakta sosiologis juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari tokoh yang tergabung dalam PRRI dari pusat hingga ke kampung-kampung adalah tokoh dan aktivis Muhammadiyah. Keterlibatan tokoh dan aktifis Muhammadiyah pada tingkat nagari dan kampung-kampung bukan hanya karena aktif terlibat dalam perjuangan melawan keotoritarian pemerintah pusat, tetapi juga karena tidak tahan terhadap tekanan yang dilakukan tentara maupun komunis. Walaupun di antara pimpinan dan tokoh Muhammadiyah yang tidak ikut mengungsi keluar kota, tetapi secara psikologis merasa ketakutan menghidupkan dan menggerakkan Muhammadiyah termasuk amal usahanya. Oleh sebab itu, Muhammadiyah mengalami kevakuman karena pimpinannya meninggalkan atau takut menggerakannya. Hal yang sama juga terjadi pada amal usahanya. Aset

Muhammadiyah yang terdiri dari lembaga pendidikan, pelayanan sosial seperti panti dan sejenisnya ditinggalkan begitu saja. Murid dan gurunya pun meninggalkan sekolah karena ketakutan menghadapi tentara dan pihak yang selama ini memusuhi Muhammadiyah.

Inilah dampak yang secara langsung ditanggung oleh Muhammadiyah meskipun jauh sebelumnya sudah dinyatakan secara tegas tidak memiliki hubungan organisatoris lagi. Akan tetapi bagi komunis dan musuh Muhammadiyah lainnya tidak menjadi perhatian. Sebab, situasi demikian dipandang sebagai momentum untuk menghancurkan Muhammadiyah yang sudah lama direncanakan, tetapi sangat dan amat sulit untuk direalisasikan. Kesulitan itu disebabkan faktor kekuatan yang ada padanya, seperti memiliki kader yang berlapis. Kemudian, tentara pusat pun menjadikan sebagian aset Muhammadiyah sebagai sasaran untuk diduduki termasuk pihak komunis. Pada masa-masa yang sulit tersebut, pimpinan Muhammadiyah menjadi kosong dan tidak bergerak. Sekolah dan aset lainpun diduduki dan dihancurkan. Dalam situasi yang demikian, tidak seorangpun yang berani kembali menggerakkan Muhammadiyah termasuk ditingkat wilayah atau propinsi.

Pada situasi itulah muncul Mohammad Yatim yang dibantu oleh seorang rohis tentara, Mayor Burhani (Syarifuddin Jaya: Wawancara: 2016) di Sumani, Solok, saudagar yang berada di pasar raya Padang, diantaranya; H. Sidi Zainuddin (pemilik toko Mas Mutiara Padang), H. Azis Burhan (pemilik Toko Serayu

Padang), St. Nurdin (berasal dari Kurai Taji), H. Abd. Rahman, (berasal dari Kurai Taji), H. Abd. Djalil (berasal dari Bukittinggi), H. St. Darwis (pemilik Grosir Bada Kampung Jawa). H. Armaini Gampo Alam (berasal dari Cupak). Selain anggota tentara aktif dan pengusaha pasar raya Padang tersebut, dalam hal-hal yang bersifat teknis administratif, Mohammad Yatim di bantu juga oleh Syarifuddin Jaya, ketika itu ia masih remaja (Syarifuddin Jaya: Wawancara: 2016). Menurut Syarifuddin Jaya, ia sering di bawa ikut rapat-rapat baik rapat yang dilaksanakan di mesjid Taqwa yang masih berlantaikan kayu maupun yang diadakan di rumah Mohammad Yatim sendiri (Syarifuddin Jaya: Wawancara: 2016).

Tokoh ini sebelumnya tidak berada dalam lingkaran kepemimpinan Muhammadiyah pada tingkat wilayah. Oleh sebab itu, jika dirunut kebelakang ia tidak memiliki rekam jejak dengan proses kepemimpinan dan perkaderan Muhammadiyah ditingkat Sumatera Barat. Pada saat itu, ia hanyalah sebagai warga Muhammadiyah yang aktif ditingkat ranting Kampung Jawa dan kemudian juga daerah kota Padang. Pada era sebelumnya Muhammadiyah umumnya dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memiliki akar ulama dan tokoh pergerakan. Misalnya, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto (1926-1930), AR. Sutan Mansoer (1930-1942), Buya Hamka (1946-1949) dan Malik Ahmad (1956-1958) (RB. Khatib Pahlawan Kayo: 2010: 91-101). Begitu pula kepemimpinan sesudahnya, seperti Buya Haroen el-Ma'any (1962-1964), Jamaan Saleh (1964-1966), Dt. Gunung Hijau, (1966-1972), Buya ZAS (1972-1983), Hasan Ahmad

(1983-1984), M. Idris Manaf (1984-1986), Amir Ali (1986-1991) (RB. Khatib Pahlawan Kayo: 2010: 91-101), dan seterusnya. Semua tokoh yang disebutkan itu muncul dari proses kepemimpinan sebelumnya, yang disebut kader berlapis. Artinya, kehadiran tokoh-tokoh tersebut pada puncak kepemimpinan Muhammadiyah sebelumnya melalui proses yang panjang dan berlapis. Saalah Yusuf Sutan Mangkuto dan Buya AR. Sutan Mansoer misalnya, lahir dari pembinaan intensif Abdul Karim Amrullah. Begitu pula Buya Hamka dan Malik Ahmad lahir dari perkaderan yang dilakukan oleh Buya AR. Sutan Mansoer dan seterusnya sehingga hampir setiap periode kepemimpinan Wilayah Muhammadiyah, tokoh-tokoh yang muncul pada puncak kepemimpinan itu selalu ada dan tampil mendampingi pimpinan sebelumnya.

Sementara itu kemunculannya tidak berasal dari latarbelakang ulama dan tokoh pergerakan. Ia lebih dikenal sebagai pegawai sebuah badan usaha milik negara, yang sekarang disebut sebagai tenaga profesional, yaitu Kepala Kantor Pos dan Telegraf Kota Besar Padang. Selain itu ia selama ini tidak termasuk ke dalam deretan aktifis yang populer baik dalam politik maupun gerakan keagamaan sebagaimana halnya tokoh Muhammadiyah yang lain. Latarbelakangnya ini sangat menguntungkan karena tidak termasuk tokoh yang diincar oleh pihak pemerintah pusat maupun lawan politik partai Masyumi terutama PKI termasuk juga oleh PRRI. Selama ini ia tidak terlibat dalam pergumulan perang ideologis dan politik sebagaimana tokoh Muhammadiyah yang lain. Jadi,

dengan kefigurannya itu, ia lebih leluasa kembali menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai serangan dan intimidasi. Namun, bukan berarti ia tidak pernah mengalami tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak. Tekanan dan intimidasi yang ia hadapi selain muncul dari pihak komunis, kelompok yang selama ini antipati, juga muncul dari pihak pemimpin lokal bahkan keluarganyapun mengalami demikian. Beban psikologis yang ditanggung oleh pihak keluarga terutama istri dan anak-anaknya semakin berat karena selalu khawatir terhadap keselamatannya. Meskipun demikian istri dan anak-anaknya tetap selalu memberikan dukungan moral untuk berjuang dan mempertahankan Muhammadiyah (Nurmiyati: Wawancara: 2015). Bahkan dengan posisinya itu, memberikan ruang yang lebih luas kepadanya untuk bergerak lebih leluasa dalam mempertahankan Muhammadiyah dari berbagai hantaman dan ancaman berbagai pihak. Apalagi ia sendiri sudah terlatih dalam menghadapi masa-masa sulit seperti itu sejak zamannya pemerintah kolonial Belanda dan penjajahan Jepang.

Meletusnya perang bersenjata antara pemerintah pusat dengan PRRI, Muhammadiyah termasuk salah satu yang menjadi korbannya secara langsung. Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang diincar untuk dibubarkan (Sumatera Barat bersama dengan daerah lainnya seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan dan beberapa daerah lainnya merupakan basis Masyumi karena pada daerah tersebut Muhammadiyah kuat, mempunyai pengaruh dan pengikut. Sebagai anggota istimewa sebelum kembali menarik diri dari keanggotaan tersebut,

Muhammadiyah sebagaimana istilah Hamka telah bekerja keras membanting tulang, agar jangan kalah. (Hamka, t.t: 3). Pada saat itu ia belum lagi berada dalam pusaran Pimpinan Muhammadiyah pada tingkat wilayah. Ia lebih banyak berhubungan langsung dengan pengalaman mengurus urat tunggang Muhammadiyah, yaitu ranting dan cabang. Pengalaman membentuk, menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah diberbagai tempat membawa ia tidak canggung berhadapan dengan masa-masa yang sulit. Ia dapat memposisikan diri dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam posisi-posisi tersebut dan bahkan dalam suasana yang mencekam sekalipun. Pada beberapa ranting dan cabang yang ia bentuk dan hidupkan nyaris tidak mulus, tetapi selalu menghadapi tantangan dan rintangan yang tidak ringan. Kadangkala ia harus berhadapan dengan situasi yang sulit karena berhadapan tidak hanya dengan masyarakat yang tidak senang dengan gerakan yang dibangunnya melalui Muhammadiyah. Akan tetapi, juga berhadapan dengan kekuasaan, yang secara politik tentunya memiliki kekuatan yang kuat dan menentukan. Apalagi pada zaman itu adalah masa penjajahan.

Pada beberapa daerah yang kulturenya berbeda dengan basis keluarganya jelas sangat menentukan kepiawaiannya dalam menghadapi situasi-situasi yang amat sulit tersebut. Sebagaimana yang ia hadapi di Payakumbuh, kampungnya sendiri, selain berhadapan dengan kekuasaan juga dengan tokoh-tokoh adat yang antipati terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah pada saat itu dalam keadaan terjepit. Tambah lagi dengan

tokoh-tokohnya yang dipersepsikan terlibat dalam PERMI. Begitu pula pengalamannya ketika berada di Kisaran, Sigli dan seterusnya tidak membuat ia putus arang untuk terus mengembangkan dakwah Muhammadiyah.

Di saat-saat genting dan rumit itu, ia muncul menjadi pemimpin Muhammadiyah Sumatera Barat. Begitu pula dalam situasi sulit itu ia dan tokoh lainnya konsentrasi membentuk dan memisahkan daerah Muhammadiyah Padang dengan luar kota yang baru saja dilaksanakan terjadi gejolak politik antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno dengan PRRI dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dan tokoh-tokoh lainnya. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang secara fakta memang banyak terlibat di dalam partai Masyumi atau paling tidak sebagai simpatisan, secara langsung berdampak kepada perkembangan dan dinamika Muhammadiyah. Dalam pada itu, pucuk pimpinan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah nyaris berada pada posisi memihak kepada PRRI. Sebagian besarnya, secara langsung ikut terlibat dalam perlawanan pemerintah pusat yang otoriter dan dipandang sudah menyimpang dari konstitusi negara. Banyak tokoh Muhammadiyah ikut berjuang, masuk hutan keluar hutan, masuk kampung keluar kampung melakukan konsolidasi gerakan dan mempertahankan diri dari serangan dan kesewenang-wenangan pemerintah pusat.

Hal ini secara langsung berdampak kepada persyarikatan, di mana Muhammadiyah nyaris tidak ada pergerakan karena ditinggalkan oleh para pemimpinnya yang sudah tidak

ada lagi ditempat. Muhammadiyah betul-betul berada dalam kevakuman. Sedangkan anggota dan simpatisannya yang masih ada ditempat nyaris tidak dapat berbuat apa-apa lagi bahkan di antaranya tidak berani mengatakan atau mengakui bahwa dia adalah orang Muhammadiyah. Begitu pula kalau ada pimpinan dan tokoh Muhammadiyah yang tidak ikut meninggalkan tempatnya mereka tidak berani mengambil inisiatif dalam mengendalikan kepemimpinan Muhammadiyah. Hal itu, disebabkan berbahaya bagi kehidupan dan keluarganya karena Muhammadiyah dianggap sebagai Masyumi oleh masyarakat umum dan oleh pihak yang sedang berkuasa (Moehammad Yatim: 1963). Oleh sebab itu, kepemimpinan Muhammadiyah nyaris berada dalam kelumpuhan.

Kauman Padang Panjang sebagai pusat pendidikan Muhammadiyah, diduduki oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan kehancurannya untuk kedua kalinya. Akibat tragedi tersebut, kompleks ini beserta seluruh asetnya terpaksa ditinggalkan begitu saja, karena seluruh siswa, mahasiswa, guru, dosen dan pimpinannya ikut bergerilya ke luar kota (Marjohan: 2006: 25). Setelah terjadi perdamaian pada Agustus 1961 dan semua pejuang telah kembali kekota, namun komplek ini sudah hancur berantakan dan gedungnya telah diduduki oleh anggota-anggota PKI. Sementara peralatan yang ada seperti kendaraan, buku-buku perpustakaan, mesin tik nyaris tidak ada lagi (Marjohan: 2006: 25).

Pada saat itu, Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Buya Malik Ahmad. Buya ini ikut bersama Syafruddin Prawiranegara dalam pengungsian

masuk hutan keluar hutan. Begitu pula tokoh lainnya seperti Idris Manaf, Hasan Ahmad dan sederetan tokoh lainnya. Pada waktu itu, tokoh-tokoh sentral Muhammadiyah nyaris tidak lagi berada ditempat dan Muhammadiyah Wilayah mengalami kekosongan pimpinan. Sementara itu, pimpinan cabang, ranting dan amal usaha nyaris “bak ayam kehilangan induk” dan tidak ada lagi yang memberikan pengayoman. Begitu pula aset dalam bentuk amal usaha nyaris sebagian besar ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang mengurusinya. Di pihak lain, rasa kekuatiran dan ketakutan keluarga para tokoh tersebut selalu menghantui sehingga pimpinan cabang, ranting dan amal usaha kehilangan pegangan. Dalam situasi yang demikian aset Muhammadiyah dengan sangat mudah diambil alih oleh pihak lain tanpa adanya pertahanan yang berarti dari warga dan pimpinan Muhammadiyah. Mereka secara terang-terangan menduduki aset Muhammadiyah. Di samping itu, sebagian aset Muhammadiyah juga dirusak sampai porak poranda. Baik pengambilalihan maupun perusakan tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang sejak dari awal memang sudah antipati terhadap Muhammadiyah maupun pihak pemerintah sendiri. Misalnya, Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang diduduki oleh pemerintah pusat pada tanggal 1 Mei 1958 (Marjohan: 2006: 25). Pusat pendidikan ini bukan hanya sekedar diduduki, tetapi dihancurkan dengan seluruh asetnya. Akibatnya, seluruh siswa, mahasiswa, guru, dosen dan pimpinannya mengungsi keluar kota (Marjohan: 2006: 25). Selain pemerintah, anggota PKI juga

menduduki aset Muhammadiyah ini sehingga ketika kondisi sudah kembali pulih tidak ada lagi aset yang tersisa dari peristiwa tersebut (Marjohan: 2006: 25). Pada sisi lain, amal usaha Muhammadiyah yang tidak ikut diduduki dan dirusak oleh pihak lain, kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak lagi diurus dengan baik, bahkan diantaranya sudah ada yang dijadikan sebagai kandang sapi dan kambing.

Moehammad Yatim sebagai tokoh yang tidak melibatkan diri pada pergerakan politik tetapi lebih memilih bekerja sebagai pegawai Kantor Pos dan Telegraf mengambil posisi yang sangat strategis di tengah terjadinya kekosongan pimpinan. Dalam sejarah hidupnya, Ia telah berpengalaman dalam menghadapi situasi-situasi sulit dalam membentuk dan menumbuhkan Muhammadiyah terutama ditingkat *grass root*. Ketika menghadapi situasi yang terjadi seperti pergolakan tersebut ia tidaklah canggung menghadapinya. Ia mengambil peran yang sangat berarti dan mengambil langkah tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang pelit. Walaupun sangat disadari ia dalam pusaran kepemimpinan wilayah dan proses perkaderan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya tidak begitu intens. Dengan modal *basic* yang sangat kuat sejak dari mudanya, membawa ia menjadi orang yang penting dalam perkembangan Muhammadiyah diberbagai tempat tidak hanya di Sumatera Barat melainkan Aceh dan Sumatera Utara serta Riau.

Dengan semangat jihad dan pengorbanan yang memompanya itu ia melakukan keliling ke cabang-cabang guna kembali memberikan semangat dan menghidupkan Muhammadiyah

diberbagai tempat. Ia menelusuri pimpinan dan tokoh Muhammadiyah yang masih dapat bertahan dan tidak ikut dalam pengungsian masuk-keluar hutan. Semua yang dilakukannya itu semata-mata berasal dari biayanya sendiri tanpa membebankan kepada siapa-siapa dengan dibantu pula oleh para pedagang yang mengelilinginya. Khusus di Kota Padang, pimpinan dan tokoh Muhammadiyah sudah pergi meninggalkan tempat sehingga tidak ada lagi pimpinan yang berada di tempat.

Dalam situasi demikian ia berupaya; *Pertama*, menyelamatkan dan mempertahankan aset yang sebagian sudah mulai diduduki oleh kelompok-kelompok lain. Misalnya, Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Padang yang sudah mulai diduduki oleh pihak lain dan bahkan terancam pembongkaran oleh pihak tentara dengan alasan tidak memiliki izin. *Kedua*, melakukan pembelaan terhadap Muhammadiyah yang mulai disuarakan oleh komunis untuk dilarang dan dibubarkan di Sumatera Barat. Beberapa kali ia dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan keberadaan Muhammadiyah dan asetnya. Ia berhasil memberikan penjelasan secara meyakinkan bahwa Muhammadiyah dan asetnya tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak-pihak tertentu. *Ketiga*, mengkonsolidasikan Muhammadiyah pada tingkat cabang dan ranting yang berada di nagari-nagari dan kampung-kampung. Ia bergerak dari pelosok ke pelosok guna menelusuri kembali dan menghidupkan Muhammadiyah dan amal usahanya yang sempat ditinggalkan oleh para pimpinannya karena terlibat dalam perjuangan melawan kediktatoran pemerintah

pusat. Pada daerah-daerah yang ia kunjungi hampir seluruh amal usaha dan asetnya sudah ditinggalkan dan sebagian besar sudah dikuasai oleh pihak lain dengan sangkaan bahwa aset tersebut adalah miliknya Masyumi (Marjohan: 2006: 25) termasuk di Padangpanjang sendiri. Salah satu senjata yang selalu ia bawa kemanamana adalah sepucuk surat persetujuan normalisasi Muhammadiyah dari panglima.

Adapun daerah-daerah yang ia konsolidasikan dalam situasi sulit itu antara lain; *Pertama*, Riau Daratan, Pekanbaru, Talaok dan Rengat (Marjohan: 2006: 25). Pada daerah-daerah ini nyaris pimpinan Muhammadiyah mengalami trauma dan ketakutan karena dicurigai oleh pemerintah pusat. Kehadirannya tidak sepenuhnya diterima bahkan warga Muhammadiyah setempat semakin kuatir terhadap keselamatan mereka. Ia meyakinkan dengan memperlihatkan surat persetujuan panglima untuk menormalisasikan kembali Muhammadiyah. *Kedua*, Sulit air. Di sini ia kesulitan mengkonsolidasikan Muhammadiyah karena tidak satupun lagi yang berani menggerakkannya. Oleh karena itu ia pergi meyakinkan camat dan pihak keamanan agar mengizinkan Muhammadiyah kembali dihidupkan meskipun awalnya keberatan, tetapi akhirnya dapat diyakinkan sehingga ia berhasil kembali membentuk cabang di bawah pimpinan Djamin Ahmad (Moehammad Yatim: 1963). *Ketiga*, Kuraitaji. Muhammadiyah di sini mengalami kevakuman akibat ditinggal oleh pimpinannya yang meninggalkan kota. Kepala nagari sempat pula tidak mengizinkan lagi Muhammadiyah dihidupkan, tetapi usahanya sangat

meyakinkan sehingga Muhammadiyah dapat lagi dibentuk meskipun orang yang akan duduk di pimpinan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pihak kepala nagari (Moehammad Yatim: 1963). *Keempat*, Kambang. Di nagari ini selain pimpinan tidak lagi aktif, Muallimin Muhammadiyah sudah dijadikan sebagai kandang sapi dan tempat parkir sepeda pada hari pasar. Kedatangannya disambut oleh camat agar kembali saja ke Padang dengan alasan keamanan dan keselamatan. Dengan berat hati dan duka ia meninggalkan Kambang dengan diberlakukannya aktifitas Muhammadiyah secara tidak manusiawi. *Kelima*, Simabur. Keadaan Muhammadiyah di daerah ini mengalami kelumpuhan dan tidak mendapat izin dari pemerintah untuk dihidupkan kembali. Musyawarah dan pelantikan cabang awalnya terpaksa dibatalkan karena camat bersikeras tidak mengizinkannya. Surat izin normalisasi Muhammadiyah dari panglima terpaksa dikeluarkannya sehingga camat dan pihak keamanan melunak dan akhirnya memberikan izin untuk Muhammadiyah (Moehammad Yatim: 1963). *Keenam*, Pulau Punjung. Dalam situasi sulit dan alat transportasi yang amat dan sangat terbatas, ia melakukan konsolidasi terhadap pimpinan dan amal usaha yang sudah tidak lagi diurus karena ditinggalkan oleh pimpinannya. Ketika ia datang rapat baru bisa dilaksanakan sesudah tiga hari (Moehammad Yatim: 1963). *Ketujuh*, Suliki Gunung Mas. Berhubung cabang belum ada, Ia mendorong berdirinya cabang di daerah ini karena potensinya sangat besar untuk berkembang. Apalagi sejumlah tokoh di daerah ini sudah mewarisi corak

pemahaman keagamaan yang modernis. Namun perizinan untuk rapat dari pemerintah sangat dan amat susah didapatkan. Namun, proses itu dilalui dengan kesabaran sehingga izin yang dimaksud berhasil didapatkan setelah dua bulan ia dan tokoh-tokoh Muhammadiyah setempat mengurusnya secara langsung (Moehammad Yatim: 1963). *Kedelapan*, Kamang. Kesulitan dalam mengurus izin rapat juga dialami di Kamang, Agam. Selain prosedurnya yang berbelit-belit, secara politik tokoh-tokoh Muhammadiyah juga tidak diuntungkan dengan banyaknya para aktifis Muhammadiyah yang terlibat sebelumnya dengan Masyumi meskipun tidak ikut mengungsi bersama dengan tokoh lainnya (Moehammad Yatim: 1963). *Kesembilan*, Lintau. Perkembangan Muhammadiyah mendapat tantangan tidak hanya dari kelompok masyarakat yang antipati terhadap Muhammadiyah, tantangan lebih berat datang dari pemerintah nagari. Ia sendiri harus mengeluarkan juga surat izin normalisasi dari panglima untuk mendapatkan izin rapat dari pihak pemerintah setempat sehingga izin dimaksud berhasil didapatkan (Moehammad Yatim: 1963). *Kesepuluh*, Surian. Tantangannya di daerah ini lebih keras lagi sampai-sampai surat izin dari panglima III/17 Agustus dan K.P. Kom. Komisariat di untuk menormalisasikan Muhammadiyah tidak bisa digunakan. Ia terpaksa melaporkan situasi demikian kepada panglima, yang akhirnya panglima sendiri juga marah dan merasa dilecehkan. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh K.P. Kom dengan pemberian izin langsung dari K.P. Kom. Komisariat Sumatera Barat

kepada Muhammadiyah atas nama Moehammad Yatim sendiri dan salinan surat izin pada K.P Res Solok dan K.P Sektor di Surian sehingga rapat dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar (Mailraport, 538x/30). *Kesebelas*, Payakumbuh. Muhammadiyah sudah resmi berdiri sejak tanggal 21 Desember 1928 (Moehammad Yatim: 1963) dipelopori oleh penghulu dan cadik pandai, yaitu H. Chatib, H. Budin, H. Dawaher dan Dt. Manggung Padang, tetapi menghadapi tantangan, tekanan dan bahkan intimidasi baik dari pihak yang antipati terhadap pergerakan Muhammadiyah maupun dari pemerintah nagari (Moehammad Yatim: 1963). Para penghulu pada masa itu berusaha mendirikan sekolah yatim dan disetujui oleh kerapatan nagari (Taufik Abdullah: 1988: 138. Akan tetapi terjadi perselisihan karena intensifnya para penghulu yang tidak tergabung dalam kerapatan nagari dalam menggerakkan Muhammadiyah pada masyarakat terutama setelah keluarnya ordonansi guru akhir tahun 1928 (Siska Okvatningsih: 2000: 29). Pada masa kolonial akibatnya dari tekanan tersebut pemerintah kolonial menyarankan agar Pengurus Besar Muhammadiyah membentuk konsul untuk perpanjangan tangan kedaerah-daerah dan akhirnya menjadi salah satu putusan kongres ke-19 di Minangkabau (Mailraport, 538x/30). Pada masa setelah PRRI, keadaan Muhammadiyah di Kubang mengalami nasib yang lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Perang saudara itu, telah membuat trauma dan ketakutan yang mendalam bagi anak nagari. Pada saat itu, nyaris aktifitas Muhammadiyah terhenti karena sebagian besar pimpinan dan tokoh Muhammadiyah ikut mengungsi “ijok” keluar baik

yang ikut dengan perjuangan PRRI maupun karena tidak tahan dengan tekanan dan intimidasi dari tentara maupun komunis. Situasi pasca terjadinya PRRI ini Moehammad Yatim dapat mengatasinya dengan memanfaatkan dua surat persetujuan dari Panglima dan KP. Kom. Polisi Sumatera Barat guna menormalisasikan kembali Muhammadiyah sehingga dapat kembali bergerak secara dinamis (Mailraport, 538x/30).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pergerakan Islam di Sumatera Barat terutama Muhammadiyah setelah meletusnya peristiwa PRRI mengalami kondisi yang sangat sulit. Hal itu ditandai dengan ditinggalkannya organisasi serta amal usahanya oleh pimpinan dan aktifisnya karena ikut “ijok” ke luar kota, alasan keselamatan dan keamanan bagi dirinya sendiri dan keluarga. Pada saat itu, nyaris Muhammadiyah tidak ada lagi kegiatan dan bahkan amal usahanya dengan mudah diduduki dan diambil alih oleh pihak lain.

Dalam kondisi demikian, Mohammad Yatim muncul mengambil alih kepemimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat guna menyelamatkan dan mempertahankan Muhammadiyah dari ancaman pihak luar. Ia bukanlah tokoh pergerakan yang berorientasi pada politik dan bukan pula berakar ulama melainkan seorang pegawai pada Kantor Pos dan Telegraf. Ia ikut membesarkan dan menggerakkan Islam melalui Muhammadiyah di sela-sela bekerja pada kantor pos. Hal itu sesuai dengan pemikiran dan keyakinannya

bahwa Muhammadiyah adalah tempat yang cocok untuk berjuang dan berjihad di jalan Islam. Upayanya itu ia lakukan dengan cara mengenalkan, memelopori berdiri dan memperkuat urat tunggang pergerakan, yaitu cabang dan ranting Muhammadiyah di mana ia ditugaskan oleh Kantor Pos dan Telegraf. Oleh karena itu ia menjadi anggota pimpinan Muhammadiyah Sigli, Aceh, Binjai, Medan, Payakumbuh, Jambi, Kisaran dan Padang.

Ketika peristiwa PRRI meletus, ia mengambil peran menyelamatkan dan mempertahankan Muhammadiyah dari ancaman tekanan, intimidasi dan bahkan pembubaran. Dalam upaya itu ia mengkonsolidasikan gerakan Muhammadiyah dari tingkat wilayah hingga cabang dan ranting setingkat dengan nagari dan jorong. Konsolidasi itu ia lakukan dengan turun langsung menemui tokoh dan warga Muhammadiyah serta pemerintah dan pihak keamanan setempat guna menormalkan kembali gerakan Islam ini. Ia, keluarga dan aktifis Muhammadiyah yang ikut bersamanya sering mendapatkan tekanan dan intimidasi dari pihak lain. Hal lain yang sangat penting dilakukannya adalah menyelamatkan aset Muhammadiyah terutama mesjdi Taqwa Muhammadiyah yang berada di jalan Bundo Kandung. Mesjid ini sempat diduduki oleh pihak lain dan bahkan terancam dibongkar dengan alasan mesjid tersebut berdiri tanpa ada izin. Lagi pula lokasinya berada di tengah pasar dan dekat dengan pusat perkantoran pemerintah. Kemudian ia berupaya melakukan pembelaan terhadap Muhammadiyah yang disuarakan komunis untuk dilarang dan dibubarkan di Sumatera Barat..

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik, *Sekolah dan Politik: Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat 1927-1933*, diterjemahkan oleh Lindayanti dan A. Guntur, Padang: FSUA, 1988
- Hamka, *Muhammadiyah-Masjumi, Muhammadiyah-Masjumi*, Jakarta: Masyarakat Islam, t.t
- Harian Haluan*, tanggal 14 Februari 1976
- Jaya, Syarifuddin, *Wawancara*, 3 Desember 2016 di Sumani, Solok
- Kayo, RB. Khatib Pahlawan, dkk, *Muhammadiyah Minangkabau (Sumatera Barat dalam Perspektif Sejarah)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010
- Mhd Ilham, "Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) di Kecamatan Sungai Beremas 1958-1965", www.pasca.unand.ac.id/gerakan-wanita-indonesia.pdf. diakses 20 Februari 2016
- Mailraport, 538x/30
- Maksum, Ilyas, *Wawancara*, 8 Januari 2016 di Kambang, Pesisir Selatan.
- Marjohan dkk, *Embrio Muhammadiyah ada di kauman Padang panjang*, (Padangpanjang: Panitia Peringatan 80 Tahun Perguruan Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, 2006), h. 25
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996
- Nurmiyati, *Wawancara*, tanggal 12 Agustus 2015 di Padang
- Yusra, Abrar, Azwar Anas: *Teladan dari Ranah Minang*, Jakarta: Kompas, 1997
- Okvatiningsih, Siska, "Dari Asas Tunggal ke Asas Islam" *Organisasi Aisyiyah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota/Payakumbuh* (1985-2000)
- Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat, *Surat Turut berlangsungkawa*, Nomor: A.6/329/1976 tanggal 10 Shafar 1396H/11 Pebruari 1976M
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Yatim, Moehammad, *dokumen pribadi* ———, *Laporan Sedjarah Organisasi dan Kebijaksanaan Pimpinan Daerah Sumatera Barat*, tanggal 20 Ramadhan 1382H/15 Februari 1963M.
- Yusuf, Muhammad, *Dokumen Pribadi*